

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHATANI KAKAO  
(STUDI KASUS PT MARS DESA TAROBOK KECAMATAN BAEBUNTA  
KABUPATEN LUWU UTARA)**

*(Implementation of Cocoa Farming Development Policy (Case Study of PT.Mars Tarobok Village Baebunta District North Luwu Utara)*

**Thalib<sup>1</sup>, Ratnawati Tahir<sup>2\*</sup>, Akbar<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar  
Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Rappocini,  
Kota Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia 90221

\*Penulis koresponden: ratna@unismuh.ac.id

Naskah Diterima : 03-11-2022

Naskah Disetujui : 09-01-2023

**ABSTRACT**

The research objective is to identify policies related to the development of cocoa farming by PT. Mars and examine the implementation of cocoa farming development policies at PT. Mars. The technique of determining informants by purposive sampling. There were 10 informants, including the Head of the Agriculture Service, 1 person from the Baebunta District BPP, 1 person from the Field Coordinator of PT Mars, 6 cocoa farmers, and 1 member of the DPRD of North Luwu Regency. Technical analysis of data using qualitative analysis. The research results show that the policies made by the government and implemented by PT. Mars is, (1) conducting certification assistance, cocoa field schools, providing seeds to cocoa farmers, demonstration gardens, wet seed premiums, fertilizer assistance to farmers, (2) Implementation of policies made by the Government and implemented by PT. Mars, (3), The policies implemented by PT. Mars has had a significant impact on the growth of cocoa production and the income of cocoa farmers.

**Keywords:** *Implementation, Policy, Government, PT. Mars, Development, and Cacao Farming.*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kebijakan terkait pengembangan usahatani kakao oleh PT. Mars dan mengkaji implementasi kebijakan pengembangan usahatani kakao di PT. Mars. Teknik penentuan informan secara *purposive sampling*. Informan berjumlah 10 orang, antara lain: Kepala Dinas Pertanian, BPP Kecamatan Baebunta 1 orang, Fild Cordinator PT Mars, Petani Kakao 6 orang, dan anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara 1 orang. Teknis analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang di buat oleh pemerintah dan di implementasikan oleh PT. Mars adalah, (1) melakukan pendampingan sertifikasi, sekolah lapang kakao, pemberian bibit kepada petani kakao, kebun percontohan, premi biji basah, bantuan pupuk kepada petani, (2) Implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan diimplementasikan oleh PT.Mars, (3), Kebijakan yang diimplementasikan oleh PT.Mars memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan hasil produksi dan pendapatan petani kakao.

**Kata kunci:** *Implementasi, Kebijakan, Pemerintah, PT. Mars, Pengembangan, dan Usahatani Kakao.*

## PENDAHULUAN

Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Menurut Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan. 2. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan. 3. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai (Tangkilisan, 2003).

Perkebunan kakao di Indonesia sebagian besar terletak di Pulau Sulawesi. Luas perkebunan ini sekitar 9,536,91 ha atau 60% dari seluruh perkebunan kakao di Indonesia, meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Total areal perkebunan kakao rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sekitar 250,670 ha dengan total produksi 166,650 ton pertahun. Produktivitas 871 kh perhektar pertahun, jumlah petani sebanyak 281,387 kepala keluarga dan rata-rata kepemilikan lahan sekitar 1,04 ha perkepala keluarga (BPS Sulsel, 2016).

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi penghasil kakao kedua di Indonesia mempunyai sebaran kakao di 6 Kabupaten dengan masing-masing kontribusi yaitu Kabupaten Luwu menempati posisi pertama dengan produksi kakao sebesar (19,12% dari produksi kakao Sulawesi selatan, diikuti oleh Kabupaten Luwu Utara sebesar (17,39%), kemudian Kabupaten Bone (11,36%), Kabupaten Luwu Timur

(8,64%), Kabupaten Pinrang (8,41%), Kabupaten Soppeng (8,01%) dan Kabupaten Donggala (10,60). Kabupaten lainnya memberikan kontribusi sebesar 29,76% (Kementrian Pertanian, 2016). Kakao Sulawesi adalah salah satu komoditi yang dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitas petani jika terjadi peningkatan diproduksi (Depparaba, 2018)

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten yang menjadi pusat produsen dan pengembangan kakao terbesar di Sulawesi Selatan. Kondisi iklim dan kandungan hara tanah sangat sesuai untuk kakao. Hampir di setiap daerah di Kabupaten Luwu Utara terdapat tanaman ini. Dari gunung ke dataran yang dekat dengan pantai. Salah satu Kecamatan penghasil kakao yang cukup besar yakni Kecamatan Baebunta.

Kecamatan Baebunta merupakan satu diantara Kecamatan penghasil kakao terbesar di Kabupaten luwu Utara. Dalam dekade terakhir produksi kakao di Kecamatan Baebunta mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan yang ditetapkan memberi dampak bagi petani kakao. kebijakan pada dasarnya dibuat dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usahatani kakao. Pentingnya kebijakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk pemererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan saat ini pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci Tahjan (2008), menjelaskan bahwa secara estimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu

pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Nugroho (2009), memberi makna implementasi kebijakan sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Ditambahkan pula, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Salah satu hal yang terpenting dari sebuah kebijakan yang di buat oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Kebijakan adalah serangkaian konsep dan prinsip yang memandu dan rencana dasar dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara Bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi, dan kelompok tertentu, maupun individu yang terikat. Kebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan yang paling penting untuk memperkuat hidup, baik dalam kehidupan organisasi pemerintah maupun swasta. Kebijakan undang-undang berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan diulang-ulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (Sahya Anggara, 2018).

Kebijakan merupakan tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek dalam kaitannya dengan keadaan kritis. Makna dari definisi tersebut, bahwa kebijakan mempunyai asas dari tindakan tertentu dalam waktu tertentu pula untuk menjawab masalah atas keadaan yang dihadapi masyarakat (Mufidah, 2020).

Winarno (2002), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu tahap siklus kebijakan adalah implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, aktor, organisasi, prosedur dan teknik dipakai secara bersama-sama dan serentak untuk melaksanakan kebijakan agar dampak dan tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik.

Usahatani kakao merupakan pemanfaatan input atau unsur produksi (lahan, tenaga kerja, modal, teknologi, pupuk, benih, pestisida) secara efektif, efisien dan berkesinambungan oleh petani untuk mencapai produksi kakao yang tinggi guna meningkatkan pendapatan pertanian. Komoditi dikembangkan sebab peranannya dalam mendukung perekonomian nasional (Mulyono, 2016).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini di laksanakan di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling*. Penentuan informan sebagai sumber data lebih banyak mempertimbangkan realitas sosial, artinya mereka mewakili masyarakat dipilih secara *purposive sampling*. Adapun Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, antara lain: Dinas Pertanian 1 orang, BPP Kecamatan Baebunta 1 orang, PT Mars 1 orang, Petani Kakao 6 orang, dan anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara 1 orang. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data dari penjelasan kata tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Seperti kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberma, 2014 antara lain:

1. Reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara cermat dan detail. Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.
2. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah

melalui teks naratif. Ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan lebih lanjut.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan dengan menyimpulkan semua pengolahan data yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Identitas Responden

Identitas responden adalah petani yang tergabung dalam kelompok petani kakao di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 10 petani kakao. Identifikasi ini mencakup karakteristik usia dan tingkat pendidikan responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada daftar tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Karakteristik usia dan tingkat Pendidikan responden

No	Nama Informan	Umur	Tingkat Pendidikan	Pekerjaan
1	Asri	52	SMA	Petani
2	Bahrum Palliwa	47	SMA	Petani
3	Zulkarnaen Jumana	35	SMA	Petani
4	Burhan S	58	SMA	Petani
5	Jamaluddin	41	SD	Petani
6	H. Ruslan	67	SMA	Petani
7	Edwin Patundungi	54	SMA	Anggota DPRD Kab. Luwu Utara
8	Asdar SP	46	S1	Kordinator BPP Kec. Baebunta
9	Arifuddin	52	S1	Kabid Perkebunan Luwu Utara
10	Erwin	35	S1	Field Coordinator PT.Mars Desa Tarobok

### Identifikasi Kebijakan Pengembangan Usahatani Kakao Oleh PT. Mars dan Pemerintah di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara

Proses identifikasi kebijakan pengembangan kakao di Desa Tarobok

Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara menunjukkan bahwa terdapat beberapa kebijakan pengembangan usahatani kakao yang dirumuskan oleh pihak pemerintah serta PT. Mars. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 2 berbunyi

bahwa setiap lembaga pemerhati kakao yang akan atau melakukan kegiatan wilayah kabupaten Luwu Utara harus memiliki kerja sama (MOU) dengan pemerintah kabupaten Luwu Utara sebelum melaksanakan kegiatannya. Hal ini yang menjadi acuan bagi pihak PT.Mars dalam mengimplementasikan beberapa kebijakan dan kesepakatan kerja ini ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Luwu Utara dengan Line manager PT.Mars.

Berdasarkan hasil identifikasi kebijakan terdapat beberapa kebijakan pengembangan usahatani kakao melalui kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan PT. Mars antara lain:

#### **a. Pendampingan Sertifikasi**

Pendampingan sertifikasi merupakan program kebijakan petani kakao dalam budidaya tanaman kakao seperti pemangkasan, pemupukan serta pemberian akses kepada petani untuk mendapatkan pupuk secara langsung serta pendampingan untuk memperoleh kualitas biji kakao yang baik yang dilakukan oleh pihak PT.Mars kepada petani kakao dan pendampingan sertifikasi ini sudah di terapkan pada 8 kelompok tani kakao di desa tarobok antar lain Sipaturu 1,Sipaturu 3,Sipainga 1,Sipainga 2,Sipainga 3,Subur,Sipatuo,dan Lamene.

#### **b. Premi Biji Basah**

Merupakan pemberian bonus kepada petani kakao yang menjual kakao basah sebanyak Rp. 350/kg sampai Rp. 450/Kg oleh PT.Mars. premi biji basah yang diberikan tergantung angka kenaikan dollar dan dicairkan dua kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan petani kakao dan bantuan ini berupa sarana produksi dalam proses budidaya tanaman kakao berupa bibit, pestisida, insektisida dan bantuan lain untuk memaksimalkan hasil produksi kakao.

#### **c. Sekolah Lapang Kakao**

Sekolah Lapang Kakao adalah program kebijakan yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani melalui koordinasi secara langsung dengan Dinas

Pertanian Kabupaten Luwu Utara. Sekolah Lapang Kakao merupakan upaya pemberdayaan petani kakao dengan memberikan pemahaman terkait budidaya kakao dan finansial dengan narasumber dari pihak PT.Mars. sekolah lapang kakao merupakan salah satu program kebijakan yang dibuat melalui kerjasama antara pemerintah dengan pihak PT.Mars yang dilaksanakan 1 kali dalam setahun antara bulan September sampai oktober pada saat kakao kurang buah dan petani tidak sibuk di kebun dan kegiatan ini dilakukan PT.Mars sejak tahun 2006 di Kabupaten Luwu Utara.

#### **d. Bantuan Bibit Kakao**

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara menyediakan bibit kakao serta media tanam berupa polybag untuk digunakan dalam membudidayakan tanaman kakao. Bantuan ini diperoleh petani dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan kebutuhan budidaya.

#### **e. Bantuan Pupuk**

Bantuan pupuk yang diberikan PT.Mars Kepada petani melalui premi biji basah dari hasil penjualan biji basah kakao dan PT.Mars sebagai penyalur bantuan pupuk yang merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi kakao di Kabupaten Luwu Utara. Bantuan pupuk disalurkan kepada kelompok tani kakao khususnya kelompok tani binaan PT.Mars. Program kebijakan ini berasal dari APBN yang berupa bantuan pupuk NPK pelangi dengan kuota 4.610 ton. Selain daripada itu, PT.Mars memberikan pendampingan kepada petani kakao yang sulit mengakses pupuk dengan memberikan pelatihan pembuatan pupuk kompos.

#### **f. Kebun Percontohan**

Kebun percontohan merupakan program kebijakan yang dibuat oleh PT.Mars dengan membuat demplot di setiap desa sebagai kebun belajar bagi petani kakao. Melalui kebun percontohan yang dibuat

petani kakao diharapkan dapat mengetahui perlakuan yang baik dalam proses budidaya kakao untuk mendapatkan hasil produksi yang baik kegiatan ini diterapkan pada 8 kelompok tani yang ada di desa tarobok setiap tani memiliki 1 kebun percontohan.

### **Implementasi Kebijakan Pengembangan Usahatani Kakao PT. Mars dan Pemerintah di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara**

Implementasi kebijakan merupakan sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Bapak BS petani (58 Tahun) sebagai berikut: *Ada bantuan bibit, pupuk dan segala macam, namanya pemanfaatan lahan kering yang diberikan beberapa desa di luwu utara termasuk ini Desa Tarobok seluas 17 hektar, ada juga alat-alat pertanian seperti gunting untuk pemangkasan.*

Artinya: ada bantuan bibit, pupuk dan lain-lain, contohnya program pemanfaatan lahan kering yang diberikan pemerintah ke beberapa desa di Kabupaten Luwu Utara salah satunya Desa Tarobok dengan luas lahan 17 hektar serta alat-alat pertanian misalnya gunting untuk proses pemangkasan.

Hal ini senada dengan yang dikatakan Bapak Jamaluddin, sebagai berikut: *Ya kami te petani cokla di bengan bantuan oleh PT.Mars sola pemerintah batuan yato na berngankan susi pupuk sola alat-alat di pake mampiaro cokla dan kami di passikola di bengan pemahaman matumba cara mampiaro cokla yato maballo supya nampa ki hasil buda na maksimal.*

Artinya: ya kami ini petani kakao di berikan bantuan oleh PT.Mars dan pemerintah bantuan yang di berikan berupa pupuk dan alat-alat untuk pemeliharaan kakao dan kami di sekolahkan untuk di berikan pemahaman cara pemeliharaan kakao yang benar untuk

mendapatkan hasil yang banyak dan maksimal.

Menurut BP petani (47 Tahun) sebagai berikut: *Menurut saya dengan adanya PT.Mars sangat membantu kami petani kakao terutama ketika musim hujan datang kami tidak perlu lagi menjual kakao secara kering karna adanya PT.Mars yang membeli kakao secara basah hal ini juga yang mengurangi resiko kakao berjamur karna tidak mendapatkan sinar matahari yang sempurna secara tidak langsung ketika kakao sudah berjamur harga jualpun turun.*

Artinya: Menurut saya PT.Mars sangat membantu petani kakao terutama ketika musim hujan sehingga petani tidak perlu lagi menjual kakao kering untuk menghindari resiko akibat kualitas biji yang terserang jamur, ketika kakao berjamur maka harga jual akan menurun.

#### **a. Pendampingan Sertifikasi**

Pendampingan sertifikasi merupakan program kebijakan petani kakao dalam budidaya tanaman kakao seperti pemangkasan, pemupukan serta pemberian akses kepada petani untuk mendapatkan pupuk secara langsung serta pendampingan untuk memperoleh kualitas biji kakao yang baik yang dilakukan oleh pihak PT.Mars kepada petani kakao dan pendampingan sertifikasi ini sudah di terapkan pada 8 kelompok tani yang ada di desa tarobok antara lain Sipaturu 1,Sipaturu 3,Sipainga 1,Sipainga 2,Sipainga 3,Subur,Sipatuo,dan Lamentre.

Menurut Bapak AF (52 Tahun) selaku Kepala Bidang Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, sebagai berikut: *Ada memang beberapa lembaga mitra yang terlibat diantaranya PT. Mars melalui sertifikasi dan program agroforestry.*

Artinya: Terdapat beberapa lembaga yang bermitra dengan pemerintah daerah Luwu Utara diantaranya PT. Mars dalam hal pendampingan Sertifikasi dan Program Agroforestri.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan bapak HR petani (67 Tahun), sebagai berikut:

*pemerintah sola PT.Mars memang melakuakn kerjasama buktinna kami te petani di bengan fasilatlas dalam mengembangkan cokla susi pendampingan sertifikasi kami tee petani di bengan pelatihan matumba carana perawatan cokla to tonganna mulai dari pembibitan sampai yato pemangkasan sola di ajahiki matumba to kualitas biji maballo sola pelatihan kabua pupuk organik.*

Artinya: Pemerintah dan PT.Mars Melakukan Kerjasama Buktinya Kami ini petani diberikan fasilitas dalam mengembangkan kakao seperti pendampingan sertifikasi. Kami sebagai petani diberikan pelatihan bagaimana cara perawatan kakao yang benar mulai daripada pembibitan sampai pemangkasan dan kami juga diajar bagaimana kualitas biji yang bagus dan cara pelatihan pupuk organik.

#### **b. Premi Biji Basah**

Merupakan pemberian bonus kepada petani kakao yang menjual kakao basah sebanyak Rp. 350/kg sampai Rp. 450/Kg oleh PT.Mars. premi biji basah yang diberikan tergantung angka kenaikan dollar dan dicairkan dua kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan petani kakao dan bantuan ini berupa sarana produksi dalam proses budidaya tanaman kakao berupa bibit, pestisida, insektisida dan bantuan lain untuk memaksimalkan hasil produksi kakao.

Menurut Bapak ZJ petani (35 Tahun) sebagai berikut: *Iye sebelum kami menjual di PT. mars di sampaikan memang sama kami kalau di jual coklat ta di PT.Mars daptki bonus dalam setiap kilonya Rp 350/kg-Rp 450/kg tergantungji dari kenaikan dolar na itu bonus kami di kasi 2 kali dalam satu bulan pertengahan tahun sama akhir tahun dan itu bonus yang di kasi sama kami ini petani bukan berupa uang tapi sarana produksi seperti somprot, bibit dan pestisida pokoknya tergantung dari kebutuhanta dan berapa bonus yang di dapat dari hasil coklat basah yg dijual.*

Artinya: sebelum kami menjual ke PT.Mars, disampaikan bahwa ketika menjual kakao

basah kita mendapatkan bonus dalam setiap kilonya Rp 350/kg-Rp 450/kg. bonus yang kami dapatkan tergantung kenaikan dolar dan bonus ini diberikan kepada kami setiap 6 bulan dalam setahun dan bonus yang diberikan bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk sarana produksi seperti penyemprot bibit dan pestisida, artinya tergantung dari kebutuhan petani kakao dan bonus yang diperoleh dari hasil penjualan biji basah.

#### **c. Sekolah Lapang Kakao**

Sekolah Lapang Kakao adalah program kebijakan yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani melalui koordinasi secara langsung dengan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara. Sekolah Lapang Kakao merupakan upaya pemberdayaan petani kakao dengan memberikan pemahaman terkait budidaya kakao dan finansial dengan narasumber dari pihak PT.Mars. sekolah lapang kakao merupakan salah satu program kebijakan yang dibuat melalui kerjasama antara pemerintah dengan pihak PT.Mars yang dilaksanakan 1 kali dalam setahun antara bulan September sampai oktober pada saat kakao kurang buah dan petani tidak sibuk di kebun dan kegiatan ini dilakukan PT.Mars sejak tahun 2006 di Kabupaten Luwu Utara.

Menurut bapak ER (35 Tahun) selaku *Fild Coordinator* Kecamatan Baebunta, sebagai berikut: *Kita juga mendukung program pemerintah dalam peningkatan kapasitas petani kakao, sehingga kalau ada sekolah lapang petani kakao tergantung apa materinya, apaka materi budidaya atau finansial itu kita nanti akan berkoordinasi dengan PPL atau pemerintah untuk membawakan materi.*

Artinya: Kami dari pihak PT.Mars mendukung setiap program pemerintah dalam peningkatan kapasitas petani kakao di Desa Tarobok dan desa yang lain, sehingga setiap program sekolah lapang petani kakao kami bekerjasama untuk menyediakan narasumber, tergantung topik materi yang diusung, baik itu tentang budidaya atau

persoalan finansial kami selalu berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) atau pemerinth terkait untuk membawakan materi.

#### d. Bantuan Bibit Kakao

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara menyediakan bibit kakao serta media tanam berupa polybag untuk digunakan dalam membudidayakan tanaman kakao. Bantuan ini diperoleh petani dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan kebutuhan budidaya.

Menurut Bapak BP petani (47 Tahun) sebagai berikut: *Ada, pernah ada pelatihan dari pemerintah, dan bantuan bibit sambung dengan pupuk*

Artinya: dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada dilakukan dengan pelatihan serta memberikan bantuan bibit sambung dan pupuk kepada pertanian.

#### e. Bantuan Pupuk

Bantuan pupuk yang diberikan PT.Mars Kepada petani melalui premi biji basah dari hasil penjualan biji basah kakao dan PT.Mars sebagai penyalur bantuan pupuk yang merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi kakao di Kabupaten Luwu Utara. Bantuan pupuk disalurkan kepada kelompok tani kakao khususnya kelompok tani binaan PT.Mars. Program kebijakan ini berasal dari APBN yang berupa bantuan pupuk NPK pelangi dengan kuota 4.610 ton. Selain daripada itu, PT.Mars memberikan pendampingan kepada petani kakao yang sulit mengakses pupuk dengan memberikan pelatihan pembuatan pupuk kompos.

Menurut Bapak AS petani (52 Tahun) sebagai berikut: *Kalau bantuan bibit, ada jga bantuan pupuk. Pernah juga ikut 2 minggu pelatihan sekolah lapang.*

Artinya: ada bantuan berupa bantuan bibit, pupuk dan pernah mengikuti pelatihan sekolah lapang selama 2 minggu.

#### f. Kebun Percontohan

Kebun percontohan merupakan program kebijakan yang dibuat oleh PT.Mars dengan membuat demplot di setiap desa sebagai kebun belajar bagi petani kakao. Melalui kebun percontohan yang dibuat petani kakao diharapkan dapat mengetahui perlakuan yang baik dalam proses budidaya kakao untuk mendapatkan hasil produksi yang baik dan kegiatan ini diterapkan pada 8 kelompok tani yang ada di desa tarobok setiap kelompok tani memiliki 1 kebun percontohan.

Menurut Bapak AD (46 Tahun) selaku Kordinator BPP Kecamatan Baebunta, sebagai berikut:

*Soal kebijakan sebenarnya kami sebagai pelaksana kebijakan program-program, yang bisa merubah untuk meningkatkan produktifitas kakao tentu kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah kami laksanakan sehingga kakao bisa bangkit kembali. Kita belajar kebelakang dengan adanya gernas kakao program itu merupakan program khusus pengembangan kakao sekaligus sebagai program nasional. Kalau secara umum kami sebagai penyuluh artinya kami tetap memberikan pendampingan kami bimbing bagaimana perawatan kakao yang benar mulai dari perawatan, pemupukan, pemangkasan itu sebagai prinsip pemerintah untuk tetap menjaga kakao yang ada di Luwu Utara.*

Artinya: persoalan kebijakan, BPP kecamatan hanya sebagai pelaksana kebijakan, yang dapat meningkatkan produktifitas kakao tentunya kebijakan pemerintah sehingga kakao dapat bangkit kembali. Dengan adanya gernas kakao sebagai program khusus pengembangan kakao secara nasional. Kami penyuluh sebagai pendamping tetap memberikan pendampingan dan pemahaman kepada petani kakao mengenai perawatan kakao yang benar mulai dari perawatan, pemupukan pemangkasan dan itu yang menjadi prinsip pemerintah untuk tetap menjaga kakao yang ada di Luwu Utara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa identifikasi dan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh PT.Mars dalam pengembangan usahatani kakao, antara lain : Identifikasi kebijakan terkait pengembangan usahatani kakao oleh PT.Mars dan pemerintah di Desa Tarobok terdapat beberapa kebijakan antara lain Pendampingan sertifikasi, Premi biji basah, Sekolah lapang kakao, Bantuan bibit kakao, Bantuan pupuk, dan Kebun percontohan. Kebijakan pengembangan usahatani kakao yang dibuat oleh Pemerintah dan diimplementasikan oleh PT.Mars. Kebijakan ini merupakan kerjasama Pemerintah dengan pihak PT.Mars terkait pengembangan usahatani kakao di Desa Tarobok. Kebijakan yang diimplementasikan oleh PT.Mars kepada petani kakao di Desa Tarobok memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan hasil produksi dan pendapatan petani kakao.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2018. Kebijakan Publik. Bandung; cv pustaka Setia.
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan. 2016. *Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Depparaba, Frederik., Karim, Harli. 2018. Prospek Kakao Nasional dalam Perspektif Kebijakan. *Agrovital; Jurnal Ilmu Pertanian Universitas Al Asyariah Mandar. Vol.3 No.1 Thn.2018*
- Direktorat Jendral Perkebunan. 2016. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar; Rehabilitas dan Perluasan Tanaman Kakao. Jakarta. Kementrian Pertanian
- Kementrian Pertanian. 2016. Outlook Komoditi Pertanian. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementrian Pertanian. Jakarta
- Miles, M.B, dan Huberman, A.M, 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mufidah, Lailly. 2020. Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Program Petani Mandiri. *Jurnal Inovasi Penelitian Vol.1 No.7 Thn.2020*. Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Mulyono, Daru. 2016. Harmonisasi Kebijakan Hulu-Hilir dalam Pengembangan Budidaya dan Industri Pengolahan Kakao Nasional. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol.7 No.2 Thn.2016*
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy (edisi revisi)*, Jakarta : Elex Media Komputindo
- Siregar, dan Nurbaiti. 2018. Pengaruh Naungan dan Pupuk NPK Terhadap Pertumbuhan Bibit Kakao (*Theobroma cacao. L*) JOM Faperta UR Volume 5 Edisi 1 Januari s/d Juni 2018.
- Tahjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: RTH

Tangklisan, HeselNogi, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.